

Bambang Sugianto, S.H., M.Hum.
Evi Purnamawati, S.H., M.H.



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


dalam Kajian Teori dan Praktik



Bambang Sugianto, S.H., M.Hum.
Evi Purnamawati, S.H., M.H.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dalam Kajian Teori Dan Praktik

 deepublish

Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK

Bambang Sugianto
Evi Purnamawati

Desain Cover :
Dwi Novidiantoro

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Werdiantoro

Proofreader :
Meysa Lanjarwati

Ukuran :
xiv, 196 hlm, Uki 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-4342-4

Cetakan Pertama :
Maret 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

In diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menjeremahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI 076/DIY/2012

Jl. Ratih, G. Elang 6, No 3, Dromo, Sandiagung, Ngablak, Sleman

Jl. Kalibawang Km. 9,3 - Yogyakarta 55581

Telp./Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cv@deepublish.co.id

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR PENULIS	vi
KATA PENGANTAR PENERBIT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Negara Hukum dan Sistem Pemerintahan	1
B. Pengertian Hukum Administrasi Negara	7
C. Ruang Lingkup dan Objek Hukum Administrasi Negara	12
D. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara	15
BAB II SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	18
A. Pengertian Sumber Hukum	18
1. Sumber hukum yang termasuk dalam artian materiil, di antaranya	21
2. Sumber hukum formal harus mempunyai salah satu bentuk sebagai berikut	21
B. Sumber Hukum Administrasi Negara	22
1. Sumber Hukum dalam Arti Materiil	22
2. Sumber Hukum dalam Arti Formil	23
3. Peraturan Perundang-undangan	25

4.	Yurisprudensi atau Putusan Hakim	31
5.	Traktat atau Perjanjian.....	32
6.	Doktrin atau Pendapat Ahli	33
7.	Konvensi atau Kebiasaan dalam Pemerintahan	35
C.	Pengundangan dan Berlakunya Undang-Undang	36
BAB. III	INSTRUMEN PEMERINTAHAN	38
A.	Pengertian Instrumen Pemerintahan.....	38
B.	Bentuk Instrumen Pemerintahan.....	41
1.	Peraturan perundang-undangan	41
2.	Ketetapan atau keputusan (<i>beschickking</i>)	43
3.	Diskresi (<i>freies ermessen</i>)	53
BAB. IV	KEKUASAAN DAN WEWENANG PEMERINTAHAN	63
A.	Pengertian Kekuasaan dan Kewenangan	63
1.	Wewenang yang bersifat terikat.....	68
2.	Wewenang bersifat fakultatif	68
3.	Wewenang bersifat bebas	69
B.	Dasar-Dasar Wewenang Pemerintahan	70
C.	Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan	72
D.	Tindakan Pemerintah.....	77
1.	Unsur tindakan hukum pemerintah	77
2.	Macam tindakan hukum pemerintah	78
3.	Karakteristik tindakan hukum pemerintah	78
BAB V	OTONOMI DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	80
A.	Otonomi Daerah	80
1.	Sistem rumah tangga formal	84
2.	Sistem rumah tangga material.....	85
3.	Sistem rumah tangga nyata atau riil	85
4.	Sistem rumah tangga sisa (residu).....	85
5.	Sistem rumah tangga nyata, dinamis dan bertanggung jawab.....	86
B.	Latar Belakang Otonomi Daerah	86

C.	Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	90
1.	Desentralisasi.....	91
2.	Asas Dekonsentrasi.....	96
3.	Asas Tugas Pembantuan (<i>Medebewind</i>)	99
D.	Otonomi Daerah dan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik.....	101
BAB VI	PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA	105
A.	Kewenangan Pemerintah.....	105
1.	Asas Legalitas.....	105
2.	Wewenang Pemerintah	108
B.	Pengertian Perbuatan Administrasi Negara	110
1.	Menurut Van Polje.....	111
2.	Menurut Romeyn	111
3.	Menurut Van Vollenhoven.....	111
C.	Perbuatan Administrasi Negara	111
D.	Macam-Macam Perbuatan Hukum Administrasi	112
1.	Menurut Sahya Anggara	112
2.	Menurut Van Poelje.....	113
3.	Menurut Prajudi Atmosudirjo.....	113
4.	Menurut Bachsan Mustafa	114
BAB VII	ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.....	116
A.	Gambaran Umum	116
B.	Sejarah Lahirnya Asas-Asas Pemerintahan yang Baik.....	120
C.	Beberapa Pendapat Terkait <i>Good Governance</i>	124
D.	Karakteristik <i>Good Governance</i>	125
BAB VIII	BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAH	128
A.	Pengertian Negara	128
B.	Bentuk Negara	129
1.	Negara federal atau serikat.....	131
2.	Negara kesatuan	135
3.	Negara konfederasi.....	136

C.	Bentuk Pemerintahan	137
1.	Bentuk kerajaan.....	138
2.	Bentuk republik	139
D.	Sistem Pemerintahan.....	139
1.	Sistem pemerintahan presidensial	139
2.	Sistem pemerintahan parlementer	141
E.	Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945.....	144
1.	Sistem pemerintahan Republik Indonesia	144
2.	Hubungan antara sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan UUD 1945	146
3.	Pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amendemen	147
4.	<i>Checks and balance</i> dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	148
BAB IX	SISTEM PEMERINTAHAN DAN DAERAH OTONOMI	150
A.	Pengertian Pemerintah Daerah	150
B.	Fungsi Pemerintah Daerah.....	152
1.	Urusan pemerintahan umum	153
2.	Penyelenggara pemerintahan.....	154
3.	Pemerintah daerah	154
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	155
5.	Perangkat daerah.....	156
6.	Pemilihan kepala daerah	157
7.	Kepegawaian daerah	158
8.	Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	158
9.	Perencanaan pembangunan.....	159
10.	Keuangan daerah.....	160
11.	Kerja sama dan perselisihan	162
12.	Pemerintah desa atau nama lain	162
13.	Pembinaan dan pengawasan.....	164

C.	Asas Pemerintahan Daerah.....	166
1.	Asas sentralisasi.....	166
2.	Asas desentralisasi.....	166
3.	Asas dekonsentrasi.....	166
4.	Asas tugas pembantuan.....	166
BAB X	PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA.....	170
A.	Peradilan Administrasi Negara.....	170
1.	Dasar hukum pembentukan peradilan administrasi.....	172
2.	Unsur-unsur peradilan administrasi.....	173
3.	Asas-asas peradilan administrasi.....	174
B.	Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.....	175
1.	Kompetensi relatif.....	175
2.	Kompetensi absolut.....	177
C.	Upaya Penyelesai Sengketa Administrasi Negara.....	178
D.	Jenis Pemeriksaan di Sidang Peradilan Tata Usaha Negara.....	182
1.	Dismissal process.....	182
2.	Pemeriksaan dengan acara singkat.....	182
3.	Pemeriksaan persiapan.....	182
E.	Pembuktian atau Alat Bukti.....	183
1.	Surat atau tulisan.....	184
2.	Keterangan ahli.....	184
3.	Keterangan saksi.....	184
4.	Pengakuan para pihak.....	185
5.	Pengetahuan hakim.....	185
F.	Upaya Hukum Peradilan Tata Usaha Negara.....	185
	DAFTAR PUSTAKA.....	187
	PROFIL PENULIS.....	195
	PROFIL PENULIS.....	196

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

dalam Kajian Teori dan Praktik

Hukum Administrasi Negara mengatur bagian dari proses penyelenggaraan negara dalam bentuk pelayanan publik, termasuk mengatur hubungan hukum antara lembaga negara dan hubungan lembaga negara dengan masyarakat. Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat-alat perlengkapan negara di dalam menjalankan tugasnya.

Dalam buku ini penulis menjelaskan negara hukum dan sistem pemerintahan termasuk ruang lingkup dan objeknya. Dalam menjalankan pemerintahan diperlukan sebuah instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga legalitas sebuah kegiatan dalam pengelolaan administrasi negara dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu semua permasalahan dan jalan keluarnya dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam penyelesaian sengketa akan dianalisis secara mendalam berdasarkan konsep hukum administrasi negara dan konsep penyelenggaraan otonomi daerah.

Buku ini dapat dijadikan sebuah bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi setiap pejabat negara, politikus, dan masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, selain itu dapat digunakan oleh kalangan akademisi yang sedang menekuni ilmu hukum, terkhusus hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
J. Kalurahan Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

✉ cs@deepublish.co.id
● Penerbit Deepublish
● @penerbitbuku_deepublish
● www.penerbitdeepublish.com



Kategori : Ilmu Hukum

ISBN 978-602-02-4342-4



9 786230 243424